

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas laporan keuangan merupakan sebuah persyaratan yang sangat vital dan harus dipenuhi saat menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi bermanfaat kepada pemakai laporan keuangan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan mendukung proses pengambilan keputusan (Lantu et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah diharuskan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi karena laporan keuangan menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah (Kuntadi et al., 2022).

Pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat dan merancang laporan keuangan, serta bertanggung jawab atas semua aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang komprehensif dan transparan, mengikuti prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi diperlukan untuk menghasilkan perubahan dalam semua aspek pemerintahan, terutama dalam hal sistem pelaporan keuangan daerah. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan bahwa hak-hak publik terpenuhi, termasuk pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dengan menetapkan standar-standar akuntansi pemerintahan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual mulai diterapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan empat ciri kualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagai prasyarat yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, prinsip akuntansi yang digunakan harus memenuhi karakteristik kualitatif tersebut (Hidayat et al., 2021).

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berfungsi sebagai auditor pemerintah, akan menilai dan mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD akan diserahkan kepada DPR atau DPRD setelah BPK menyelesaikan auditnya, kemudian LKPD akan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat (Lantu et al., 2023). Empat jenis opini diberikan oleh BPK setelah menyelesaikan audit terhadap laporan keuangan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak Opini atau tidak memberi Pendapat (Disclaimer). Opini wajar tanpa pengecualian diberikan dalam kasus di mana laporan keuangan pemerintah daerah tidak mengandung salah saji yang signifikan. Dengan memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa laporan tersebut memiliki kualitas yang baik (Hidayat et al., 2021).

Kualitas yang rendah dalam pembuatan laporan keuangan dapat timbul karena beberapa faktor, seperti ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, kurangnya pemahaman tentang akuntansi oleh mereka yang menyusun laporan keuangan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi terhadap software yang dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan. Selain itu, peran lemah dari internal audit juga bisa menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan tersebut.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Hal ini dikarenakan banyak daerah yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, namun dari opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan, kelemahan pengendalian baik eksternal ataupun internal, dll yang kemudian berpengaruh pada kualitas dari laporan keuangan pemerintah tersebut. Salah satu kasus tersebut telah ditemukan terjadi di Kabupaten Kudus.

Pada tanggal 22 Mei 2023, Kabupaten Kudus sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan pemerintah daerahnya sebanyak sebelas kali berturut turut (<https://jatengprov.go.id>, 2023). Walaupun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 ini telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, akan tetapi hal tersebut tidak mencerminkan bahwa daerah tersebut bebas dari penyimpangan karena pada bulan Juli 2023 telah ditemukan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun 2022.

Pada tahun anggaran 2022, KONI Kudus menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus sebesar Rp10,9 miliar dengan rincian dari APBD murni Rp8,4 miliar dan dari APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,5 miliar untuk didistribusikan kepada 53 Pengurus Cabang. Namun dalam pendistribusian anggaran hibah itu diduga terdapat permasalahan mulai dari ada yang tidak mendapatkan anggaran hingga anggaran yang diterima tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran KONI Kudus tahun 2022 saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus untuk penyelidikan lebih mendalam. Dalam pengusutan kasus tersebut, Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Setelah pemeriksaan tersebut akhirnya Kejari Kabupaten Kudus menetapkan mantan ketua KONI Kudus periode 2021 – 2025 Imam Triyanto sebagai tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,57 Miliar. Kerugian negara sebesar Rp 2,57 Miliar tersebut meliputi kerugian negara pada tahun anggaran 2022 sebesar 1,6 Miliar karena banyak laporan pertanggungjawaban yang fiktif dan tahun 2023 sebesar Rp 971 juta. Dalam mengungkap penyalahgunaan dana hibah yang tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, Kejari Kudus melakukan pemeriksaan kembali terhadap 65 orang termasuk jajaran pengurus KONI dan mantan Bupati Kudus, HM Hartopo untuk menelusuri aliran dana hibah dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan ketua KONI periode 2021 – 2025 (www.detik.com, 2023).

Berdasarkan hasil temuan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus belum memenuhi kriteria agar laporan keuangan dikatakan berkualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kriteria yang tidak terpenuhi yaitu relevan, andal, dan dapat dibandingkan karena adanya manipulasi data keuangan dan banyak ditemukan laporan pertanggungjawaban yang fiktif. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan dengan baik untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, *Locus of control*, dan penerapan kebijakan akuntansi. Berikut ini adalah uraian tentang bagaimana masing masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan seperangkat aturan, prinsip, pedoman, dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka secara akurat, konsisten, dan transparan. Standar-standar ini dirancang untuk memastikan bahwa akuntansi pemerintah mencerminkan transaksi dan peristiwa dengan benar, serta memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami situasi keuangan dan kinerja

pemerintah dengan baik. standar akuntansi pemerintah Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Semakin banyak standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan maka kemungkinan besar semakin bagus kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh (Mahartini et al., 2021). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa penerapan standar akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian juga dilakukan oleh (Aizy & Haryati, 2023; Ariyanto, 2020; Hidayat et al., 2021; Lantu et al., 2023; Muliani et al., 2023; Yanti et al., 2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi adalah komponen kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi komunikasi dan pengolahan data, yang digunakan untuk mengirimkan dan memproses data, dikenal sebagai teknologi informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta dapat membantu manajemen data (Lantu et al., 2023). Semakin besar pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan daerah maka akan mempermudah pemerintah tersebut untuk menyajikan laporan keuangan dan juga dapat meminimalisir adanya kesalahan catat karena sudah secara otomatis tersaji.

Penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh (Lantu et al., 2023). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh (Satriawan & Dewi, 2020; Shofa et al., 2022; Sikumbang et al., 2020; Syamsuddin, 2022). Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Locus of control merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Locus of control* adalah konsep dalam psikologi yang merujuk pada keyakinan individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atas kehidupan dan kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Terdapat dua tipe utama dari *locus of control* yakni internal *locus of control* dan external *locus of control*. Seseorang dengan internal *locus of control* cenderung lebih mungkin untuk mengambil inisiatif dan berusaha mencapai tujuan mereka, sementara orang dengan external *locus of control* mungkin cenderung merasa kurang termotivasi atau cenderung pasif dalam menghadapi tantangan. Konsep ini digunakan dalam psikologi untuk memahami perilaku, respon terhadap stres, dan motivasi individu.

Penelitian mengenai pengaruh *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh (Aizy & Haryati, 2023; Damayanti & Pratiwi, 2022; Sudiarti & Juliarsa, 2020). Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa *locus of control* memiliki korelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik *locus of control* yang dimiliki oleh individu maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penerapan kebijakan akuntansi merupakan faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi adalah pedoman yang digunakan untuk merencanakan dan menghadirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuannya diterapkannya kebijakan akuntansi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan dengan memberikan informasi yang memungkinkan perbandingan laporan keuangan antara periode dan entitas yang berbeda, sehingga kepuasan pemakai laporan keuangan dapat terpenuhi (Aqila & Yusmita, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh penerapan kebijakan akuntansi telah dilakukan oleh (Aqila & Yusmita, 2022). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Ratna et al., 2023). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya hasil penelitian yang beragam terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian ini dinilai masih layak dilakukan kembali. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, *locus of control*, dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah dikarenakan untuk menguji serta menganalisis kembali setiap variabel independen terhadap variabel dependent guna memastikan pengaruh dan indung nilai dari setiap variabel yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga ingin mengujikan setiap variabel independent terhadap variabel dependent dengan objeknya yaitu organisasi pemerintah yang ada di Kabupaten Kudus supaya mengetahui nantinya pengaruh dari setiap variabel tersebut akan sama atau berbeda.

Dengan adanya penyalahgunaan dana KONI yang terjadi di Kabupaten Kudus ini mencerminkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus masih tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan bagi OPD Kabupaten Kudus untuk mengetahui apakah adanya kasus penyalahgunaan dana KONI yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus belum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dipengaruhi oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, *locus of control*, dan penerapan kebijakan akuntansi atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, *locus of control*, dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Lantu et al., 2023) dengan menambahkan dua variabel yaitu *locus of control* dan penerapan kebijakan akuntansi sebagai variabel independennya. Selain penambahan variabel independen objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini

juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang sebelumnya objek yang diteliti yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sedangkan didalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Alasan dipilihnya variabel *locus of control* dalam penelitian ini dikarenakan *locus of control* yang dimiliki masing-masing individu dapat menggambarkan motivasi dan kinerja yang berbeda dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, semakin baik *locus of control* yang dimiliki maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Damayanti & Pratiwi, 2022). Sedangkan alasan dipilihnya variabel penerapan kebijakan akuntansi dalam penelitian ini yaitu dalam penyusunan sebuah laporan keuangan perlu memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku, dikarenakan kebijakan akuntansi menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan dan mempengaruhi cara informasi keuangan disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin sesuai laporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang telah diterapkan maka kualitas laporan keuangan yang disajikan semakin akurat dan jelas (Aqila & Yusmita, 2022). Oleh karena itu, kedua variabel ini dipilih karena variabel tersebut relevan dengan variabel dependen pada penelitian ini dan variabel tersebut masih jarang digunakan terhadap variabel dependen pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, *locus of control*, Dan Penerapan

Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Kudus)”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menjaga konsistensi dalam topik penelitian ini, peneliti membatasi topik yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel standar akuntansi pemerintah (X1), Teknologi Informasi (X2), *locus of control* (X3), dan Kebijakan Akuntansi (X4) sebagai variabel independen. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen.
2. Fokus penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu bagi dunia akademis dalam hal akuntansi sektor publik, khususnya penelitian ini akan membahas pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, *locus of control*, dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil dari penelian ini diharapkan digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan literatur dalam memberikan informasi bagi pembaca serta pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang terkait.